



# RENJA 2025



**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN DELI SERDANG**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, sehingga rancangan akhir rencana kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Renja 2025 adalah perencanaan yang memuat kegiatan/program perangkat daerah dalam satu tahun yang merupakan implementasi dari RENSTRA BKAD 2025-2026. Diharapkan dokumen ini dapat menjadi manfaat bagi banyak pihak serta menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran tahun 2025.

Lubuk Pakam, Mei 2024

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN DELI SERDANG



BAGHIDA THOMAS HARAHAP, SH  
PEMBINA TK. I  
NIP. 19730721 199503 1 003

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan .....	4
1.4. Sistematika Penulisan.....	4
<b>BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....</b>	<b>6</b>
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	15
2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	15
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	19
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	23
<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....</b>	<b>24</b>
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	24
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah .....	25
3.3. Program dan Kegiatan.....	27
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....</b>	<b>31</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>56</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023.....	8
Tabel 2	Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2022.....	15
Tabel 3	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang .....	20
Tabel 4	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang.....	23
Tabel 5	Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025..	32

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 2 ayat (2), disebutkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Jenjang perencanaan daerah terdiri dari perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan. Dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pasal 13 Ayat (2) Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Untuk menunjang Penyelenggaraan Fungsi Pemerintahan Daerah yang berdaya guna dan berhasil maka Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang sebagai salah satu fungsi penunjang pemerintahan perlu menyusun perencanaan pembangunan daerah dalam Rencana Kerja (RENJA) SKPD.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) merupakan salah satu tahapan penyusunan perencanaan program dan kegiatan untuk periode satu tahun ke depan dalam rangka mewujudkan tujuan, sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD). Dokumen Renja pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran

strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan

Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang TA 2025 adalah penjabaran dari Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang 2025 – 2026. Kedua dokumen tersebut mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Deli Serdang tahun 2025 serta mendasarkan pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026 dan RPJPD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2005 - 2025. Dalam menyusun Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang perlu ditetapkan tujuan, sasaran, indikator kinerja, pagu indikatif, perkiraan maju serta penyalarsan program dan kegiatan sesuai skala prioritas target Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah dan RPD Kabupaten Deli Serdang tahun bersangkutan.

## **1.2 Landasan Hukum**

Bahwa Penyusunan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang mengacu pada:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Bupati Kabupaten Deli Serdang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang
14. Peraturan Bupati Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025-2026.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

#### a. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang adalah sebagai dokumen perencanaan dan penganggaran untuk periode satu tahun anggaran dan mempunyai fungsi :

1. Menyelaraskan tujuan dan sasaran Badan Keuangan dan Aset Daerah dengan program, kegiatan dan sub kegiatan serta penganggaran tahun 2025;
2. Evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun anggaran 2023.

#### b. Tujuan

Tujuan disusunnya Renja ini antara lain:

1. Menjabarkan Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2025-2026 kedalam program dan kegiatan untuk periode satu tahun;
2. Pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2025;
3. Sebagai Upaya mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan anggaran dan program kegiatan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

#### **BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**



- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

### **BAB V PENUTUP**

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

Pelaksanaan evaluasi yang dilakukan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2023, dilaksanakan untuk mengetahui realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan, mengetahui realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan, dan mengetahui realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan. Sehingga dengan adanya pelaksanaan evaluasi dapat diketahui:

- a. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/ kegiatan;
- b. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;
- c. Kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra SKPD ditujukan untuk mengidentifikasi dan mengetahui sampai sejauhmana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Pencapaian target kinerja dinilai melalui suatu standar yang mampu menggambarkan tingkat keberhasilan dari program dan kegiatan yang direncanakan, berupa indikator dengan target kinerja sebagai instrument penilaian.

Evaluasi ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2 atau tahun 2023) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1 atau tahun 2024 sampai triwulan

II), mengacu pada APBD tahun 2024 yang sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

Tabel rekapitulasi hasil pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024**  
**Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang**

**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan Tahun 2024	Prakiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-								100%
5 02 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-								100%
5 02 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	5 Dokumen	100%
5 02 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	5 Dokumen	100%
5 02 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	5 Laporan	100%
5 02 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-						-		100%
5 02 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	60 Orang/bulan		60 Orang/bulan	44 Orang/bulan	73%	60 Orang/bulan		100%

						Tunjangan ASN								
5	02	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	60 Dokumen	100%
5	02	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	20 Dokumen	100%
5	02	01	2.03	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	5 Laporan	100%
5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-						-		100%
5	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	60 Paket		60 Paket	41 Paket	42%	60 Paket		100%
5	02	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	120 Orang		0	0	0%	120 Orang		100%
5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-						-		100%
5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	100%	2 Paket		100%
5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket		7 Paket	6 Paket	85%	10 Paket		100%
5	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket		34 Paket	34 Paket	100%	36 Paket		100%
5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		6 Paket	6 Paket	100%	4 Paket		100%
5	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	100%	2 Dokumen		100%

5	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan		100%
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan		100%
5	02	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3000 Dokumen		3000 Dokumen	3000 Dokumen	100%	3500 Dokumen		100%
5	02	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen		12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan		100%
5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-						-		100%
5	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit		7 Unit	1 Unit	15%	11 Unit		100%
5	02	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit		10 Unit	7 Unit	70%	6 Unit		100%
5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-						-		100%
5	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan		100%
5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan		24 Laporan	24 Laporan	100%	24 Laporan		100%
5	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan		100%
5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-						-		100%

5	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit		18 Unit	18 Unit	100%	18 Unit		100%
5	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit		8 Unit	4 Unit	50%	8 Unit		100%
5	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		1 Unit	1 Unit	100%	2 Unit		100%
5	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit		2 Unit	2 Unit	100%	4 Unit		100%
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	-								100%
5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	-						-		100%
5	02	02	2.01	03	Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	78 Dokumen		54 Dokumen	78 Dokumen	100%	54 Dokumen		100%
5	02	02	2.01	04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	78 Dokumen		54 Dokumen	78 Dokumen	100%	54 Dokumen		100%
5	02	02	2.01	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	78 Dokumen		54 Dokumen	78 Dokumen	100%	54 Dokumen		100%
5	02	02	2.01	06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	78 Dokumen		54 Dokumen	78 Dokumen	100%	54 Dokumen		100%
5	02	02	2.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen		100%
5	02	02	2.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen		100%
5	02	02	2.01	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen		100%

5	02	02	2.01	13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	70 Orang		0	0	0%	70 Orang		100%
5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	-						-		100%
5	02	02	2.02	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen		100%
5	02	02	2.02	03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	936 Dokumen		648 Dokumen	936 Dokumen	100%	648 Dokumen		100%
5	02	02	2.02	05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen		100%
5	02	02	2.02	06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen		100%
5	02	02	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pematangan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pematangan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan	12 Laporan		12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen		100%







## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis pencapaian kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang terdiri dari 2 sasaran dan 4 indikator yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023 dan Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai Perubahan Renstra 2019-2024 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2  
Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah  
Badan Keuangan dan Aset Daerah  
Tahun 2023

No	Indikator	Satuan	Target Renstra					Realisasi Capaian Thn 2023	Proyeksi		Catatan Analisis
			Thn 2020	Thn 2021	Thn 2022	Thn 2023	Thn 2024		Thn 2024	Thn 2025	
1	Persentase penyusunan laporan keuangan dan APBD yang tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
2	Persentase aset yang terinventarisir	%	-	-	-	100	100	100	100	100	Tercapai
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	77	78	79	80	81	87,50	82	84	Tercapai
4	Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Nilai	70	72	74	76	78	78,89	78	78	Tercapai

## 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang mempunyai tugas berdasarkan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang yaitu membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan sub pengelola keuangan dan aset yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Deli Serdang.

Sementara yang menjadi fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Bupati diatas adalah:

1. Perumusan kebijakan teknis Bidang Keuangan dan Aset Daerah;
2. Pelaksanaan kebijakan Bidang Keuangan dan Aset Daerah;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Keuangan dan Aset Daerah;

4. Pembinaan teknis Bidang Keuangan dan Aset Daerah; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Disamping melaksanakan tugas sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang juga diberikan wewenang oleh Bupati Deli Serdang selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD Kabupaten Deli Serdang.

Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang diberi tugas – tugas sebagai berikut;

1. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
2. menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
3. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD);
4. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
5. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.

Dalam wewenang fungsinya selaku BUD, PPKD berwenang untuk:

1. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
2. mengesahkan DPA/DPPA perangkat daerah;
3. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
4. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
5. menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD);
6. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
7. melaksanakan system akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
8. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah;
9. menunjuk pejabat di lingkungan satuan kerja pengelolaan keuangan daerah selaku kuasa BUD.

Mengacu pada tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang, maka peranan BKAD sangat penting dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pencairan, pelaporan dan pertanggungjawaban APBD, namun peranan penting tersebut tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak didukung oleh sarana dan prasarana serta sumber daya yang memadai dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi pelayanan.

Terkait dengan pelaksanaan kewenangan dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, maka penyusunan rencana strategis perlu memperhatikan adanya isu-isu strategis baik yang berasal dari internal maupun eksternal, antara lain tentang tata kelola pemerintahan.

Tata kelola pemerintah dalam pembangunan daerah juga memiliki peranan yang penting. Tanpa ada tata kelola pemerintahan yang baik, pelaksanaan pembangunan dan kesejahteraan untuk kehidupan masyarakat daerah akan sulit untuk dilaksanakan. Mewujudkan hal itu, pemerintah perlu menciptakan tata kelola pemerintahan yang akuntabilitas, transparansi, dapat diprediksi, efektif dan efisien.

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategi, telaahan terhadap visi misi dan program kepala daerah.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah terdapat isu-isu penting termasuk hal-hal yang merupakan permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, tetapi BKAD telah berupaya mengambil langkah-langkah solusi sebagai berikut;

1. Penyusunan APBD membutuhkan ketepatan waktu dan keakuratan data baik dalam penganggaran dan realisasinya. Untuk mendukung hal

tersebut dibutuhkan sistem aplikasi yang memadai dan jaringan yang mendukung pengelolaan keuangan dan aset yang dilaksanakan secara online.

2. Dalam hal memudahkan proses pencairan SP2D, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang bersama PT. Bank Sumut akan melakukan kerjasama CMS (Cas Management System) dan telah melakukan sosialisasi serta bimbingan teknis implementasi CMS Kasda dan CMS OPD non SP2D.
3. Penyusunan laporan keuangan juga sangat diharapkan dapat diselesaikan tepat waktu, yaitu sebelum 31 Maret setiap tahunnya. Untuk itu BKAD dalam hal ini bidang Akuntansi selaku bidang yang menyusun laporan keuangan pemerintah daerah yang merupakan hasil kompilasi dari laporan keuangan perangkat daerah selalu melakukan pendampingan dan rekonsiliasi data kepada perangkat daerah untuk mempermudah dan mempercepat tersusunnya laporan keuangan pemerintah daerah.
4. Penyusunan laporan keuangan yang baik tidak terlepas dari tertibnya data aset atau inventarisasi aset tiap perangkat daerah. Upaya pengamanan aset, salah satunya dengan pengurusan sertifikat tanah milik Pemkab juga terus dilakukan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah yang tiap tahun ditargetkan dapat menyelesaikan 100 sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh BPN.

#### **2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Dokumen rancangan Renja memuat informasi tentang rumusan kebutuhan program dan kegiatan hasil review terhadap rancangan awal RKPD yang lengkap dengan indikator kinerja, besaran target/tolak ukur dan besaran dana yang dibutuhkan untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah serta identifikasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan didanai.

Penyusunan Rancangan Awal Renja dari Rancangan Awal RKPD berjalan secara paralel dalam kurun waktu yang bersamaan, sehingga ketika ranwal RKPA telah ditetapkan maka seluruh Perangkat Daerah perlu

melakukan perbandingan-perbandingan antara ranwal renja yang telah disusun dengan Rancangan Awal RKPD yang telah ditetapkan, guna menghindari inkonsistensi perencanaan antara Pemerintah Daerah dan perangkatnya, dan Rencana Kerja BKAD sudah sinkron tidak terdapat perbedaan dengan rancangan awal RKPD. Informasi review terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada tabel 3 berikut:

Tabel 3  
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025  
Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		Terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten deli serdang	-	177.187.993.179,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten deli serdang	-	177.186.054.301,00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Deli Serdang	Tersusunnya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	82.716.364,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Deli Serdang	Tersusunnya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	80.777.486,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten Deli Serdang	Tersusunnya administrasi keuangan perangkat daerah	100%	9.656.941.837,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten Deli Serdang	Tersusunnya administrasi keuangan perangkat daerah	100%	9.656.941.837,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kabupaten Deli Serdang	Tersusunnya administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	218.578.506,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kabupaten Deli Serdang	Tersusunnya administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	218.578.506,00	



	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Deli Serdang	Tersusunnya administrasi umum perangkat daerah	100%	2.558.910.746,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Deli Serdang	Tersusunnya administrasi umum perangkat daerah	100%	2.558.910.746,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Deli Serdang	Terlaksananya Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	767.606.640,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Deli Serdang	Terlaksananya Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	767.606.640,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Deli Serdang	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	162.336.837.286,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Deli Serdang	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	162.336.837.286,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Deli Serdang	Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1.566.401.800,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Deli Serdang	Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1.566.401.800,00	
2	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>		Terlaksananya program pengelolaan keuangan daerah	-	575.673.687.054,00	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		Terlaksananya program pengelolaan keuangan daerah	-	625.995.272.415,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Kabupaten Deli Serdang	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100%	2.547.518.600,00	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Kabupaten Deli Serdang	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100%	2.547.518.600,00	

	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Kabupaten Deli Serdang	Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100%	950.214.150,00	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Kabupaten Deli Serdang	Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100%	950.214.150,00	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Kabupaten Deli Serdang	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100%	2.038.350.464,00	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Kabupaten Deli Serdang	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100%	2.038.350.464,00	
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kabupaten Deli Serdang	Terlaksananya Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	570.137.603.840,00	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kabupaten Deli Serdang	Terlaksananya Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	620.457.250.323,00	
3	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>		Terlaksananya Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	2.704.944.573,00	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		Terlaksananya Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	2.704.944.573,00	
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kabupaten Deli Serdang	Terlaksananya Pengelolaan BMD	100%	2.704.944.573,00	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kabupaten Deli Serdang	Terlaksananya Pengelolaan BMD	100%	2.704.944.573,00	
<b>J U M L A H</b>					<b>755.566.624.806,00</b>					<b>805.886.271.289,00</b>	

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya bahwa selain melaksanakan fungsinya selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah ( BUD ) yang mengelola Belanja PPKD dan Pengeluaran Pembiayaan. Usulan program dan kegiatan dari masyarakat disampaikan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan. Usulan yang lolos verifikasi pada musrenbang desa diteruskan pada Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan untuk dibahas lebih lanjut sesuai skala prioritas Kecamatan. Hasil musrenbang kecamatan diteruskan kembali pada Musyawarah Rencana Pembangunan Kabupaten untuk diakomodir sesuai kapasitas anggaran dan prioritas pembangunan Kabupaten. Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku satuan kerja perangkat daerah tidak menampung usulan dari masyarakat ke dalam program dan kegiatan tetapi selaku PPKD, BKAD menampung usulan masyarakat yang diakomodir ke dalam belanja hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan kepada Desa atau masuk dalam belanja non program. Usulan masyarakat melalui musrenbang tersebut tidak masuk ke dalam rencana kerja (renja) BKAD selaku SKPD sehingga renja BKAD tidak menjelaskan mengenai usulan masyarakat tersebut.

Berkenaan dengan hal tersebut, usulan usulan program dan kegiatan masyarakat yang disampaikan melalui BKAD Kabupaten Deli Serdang sebagaimana pada tabel berikut:

**Tabel 4**  
**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024**  
**Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang**

<b>BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b>					
No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6

## BAB III

### TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

#### 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan dengan tetap mempertimbangkan kemampuan Nasional dan Sumber Daya yang ada, maka perlu disusun Program Pembangunan Nasional (Propenas). Propenas merupakan rencana induk pembangunan perencanaan nasional hasil konsensus dan komitmen bersama masyarakat Indonesia yang memuat pencapaian visi dan misi bangsa. Dengan demikian, fungsi Propenas adalah untuk menyatukan pandangan dan derap langkah Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia dalam melaksanakan prioritas pembangunan selama lima tahun ke depan.

Program prioritas kebijakan pembangunan nasional yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah diantaranya mengenai aset daerah, dan saat ini masih terus dilakukan sinkronisasi aset dan pemeriksaan aset ke perangkat daerah agar diperoleh laporan aset yang akurat dan akuntabel sehingga akhirnya Kabupaten Deli Serdang bisa terus mempertahankan opini WTP dari hasil audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan

Dalam penganggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah sudah menggunakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah dari Kementerian Dalam Negeri yang diakses melalui [www.sipd-ri.kemendagri.go.id](http://www.sipd-ri.kemendagri.go.id) Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menjadi tahapan yang sangat penting dalam menjalankan roda pembangunan dan pemerintahan yang setiap tahunnya ditetapkan dalam rangka mewujudkan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat. Tahapan yang lebih baik harus melalui proses perencanaan,

pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pembangunan sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat

Dalam tahapan perencanaan dilakukan melalui pembahasan atas kebijakan yang akan dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak termasuk masyarakat, dengan mempertimbangkan capaian kinerja, potensi dan permasalahan serta memperhatikan aspirasi masyarakat. Sedangkan untuk penganggaran keuangan daerah ditetapkan dalam kebijakan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Program prioritas kebijakan pembangunan nasional berikutnya tentang Transaksi Non Tunai/TNT. Transaksi Non Tunai / TNT adalah pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrumen berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu, cek, bilyet giro, uang elektronik, dan CMS atau sejenisnya.

Manfaat implementasi transaksi non tunai yaitu mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, mencegah peredaran uang palsu, menghemat pengeluaran Negara, menekan laju inflasi, mencegah transaksi ilegal (korupsi), meningkatkan sirkulasi uang dalam perekonomian (velocity of money), dan mewujudkan tertib administrasi pengelolaan kas.

### **3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah**

Perencanaan pembangunan pada Kabupaten Deli Serdang disusun berdasarkan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah 2025-2026 yang disusun sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir pada Tahun 2024.

Penyusunan dokumen RPD Kabupaten Deli Serdang tanpa visi dan misi, namun berlandaskan isu strategis aktual yang telah dirumuskan dengan memperhatikan keberlanjutan dan keselarasan dengan visi dan misi yang telah ditetapkan pada RPJPD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2005-2025.

Berlandaskan pada hal tersebut maka tujuan Rencana Pembangunan Daerah 2025-2026 disusun sebagai berikut:

1. Mewujudkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing
2. Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat
3. Mewujudkan infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
4. Mewujudkan masyarakat yang religius dan taat hukum sesuai dengan nilai-nilai budaya dan kearifan
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel

Badan Keuangan dan Aset Daerah secara langsung mendukung tujuan kelima. Untuk mewujudkan tercapainya tujuan dan prioritas pembangunan Kabupaten Deli Serdang, sesuai dokumen Rencana Strategis Tahun 2025 – 2026 BKAD, telah ditetapkan tujuan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang adalah “Mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel”.

Tujuan tersebut menjadi pedoman dalam menyusun renja agar semua program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum pada Renja BKAD searah dengan tujuan yang ingin dicapai.

Setelah tujuan ditetapkan, maka langkah selanjutnya adalah menetapkan sasaran sebagai suatu hasil yang lebih spesifik dan terukur. Sasaran ini merupakan bagian internal dalam proses perencanaan strategis. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi. Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah;

1. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah;
2. Meningkatnya kualitas pelayanan dan kinerja perangkat daerah.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mencapai tujuan dan sasaran dilakukan melalui penetapan program, kegiatan dan sub kegiatan. Sebagai suatu alat strategis, program, kegiatan dan sub kegiatan akan memberikan arah bagi pencapaian tujuan dan sasaran tersebut dalam kurun waktu satu tahun.

### 3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) mempunyai tugas, antara lain menyusun Rancangan Perda tentang APBD, Rancangan Perda tentang Perubahan APBD, dan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka BKAD Kabupaten Deli Serdang dalam menyusun program yang bersifat reguler, mengkoordinir dan memfasilitasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, utamanya di bidang keuangan dan aset daerah,

Pada Tahun 2025 Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang akan melaksanakan 3 Program, 12 Kegiatan dan 52 Sub Kegiatan, meliputi:

#### I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
  - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
  - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
  - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  - Fasilitasi Kunjungan Tamu
  - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
  - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Pengadaan Mebel
  - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

## **II. Program Pengelolaan Keuangan Daerah**

1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
- Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
  - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD
  - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD
  - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD
  - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD



- Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
  - Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
  - Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
2. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
- Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
  - Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
  - Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
  - Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pematangan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
- Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
  - Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
  - Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
4. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
- Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan

- Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
- Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota

### **III. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah**

#### **1. Pengelolaan Barang Milik Daerah**

- Penyusunan Standar Harga
- Inventarisasi Barang Milik Daerah
- Pengamanan Barang Milik Daerah
- Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
- Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
- Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

Rumusan Program dan Kegiatan diatas sudah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 serta Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 merupakan dokumen yang menjadi acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif. Rencana kerja program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel 6 berikut:

Tabel 5  
Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD)  
Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang  
Tahun 2025

No	Kode				Urusan / Bidang / Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)		
														Nasional					Daerah
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH					805.886.271.289,00						809.068.130.542,00			
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					805.886.271.289,00						809.068.130.542,00		
	5	02					KEUANGAN					805.886.271.289,00						809.068.130.542,00	
1	5	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	177.186.054.301,00						-	177.493.861.869,00	
	5	02	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	78Poin 78Poin			-	80.777.486,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	-	78Poin 78Poin	82.393.034,00	

5	02	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	20.825.678,00	Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	-		21.242.191,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
						Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	20.825.678,00	Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	-		21.242.191,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	39.126.130,00	Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	-		39.908.652,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	84Nilai		-	9.656.941.837,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	-	84Nilai	9.850.080.672,00	
	5	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													

						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			60 Orang/bulan	7.462.853.561,00	Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM -DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	-		7.612.110.632,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN													
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			12 Dokumen	2.074.057.928,00	Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM -DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	-		2.115.539.086,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD													
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			4 Dokumen	47.589.548,00	Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM -DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	-		48.541.338,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	

5	02	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	72.440.800,00	Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM -DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	-		73.889.616,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	84Nilai			-	218.578.506,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	-	84Nilai	222.950.075,00	
5	02	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				60 Paket	111.786.545,00	Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	-		114.022.275,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	



	5	02	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan													
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				120 Orang	106.791.961,00	Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	-		108.927.800,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	84Nilai		-	2.558.910.746,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	-	84Nilai	2.609.088.958,00	
	5	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	14.180.767,00	Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	-		14.464.382,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

5	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7 Paket	373.998.575,00	Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	-		380.478.546,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	86.789.221,00	Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	-		88.525.005,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	13.223.900,00	Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	-		13.488.378,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

5	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	15.897.550,00	Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			16.215.501,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	47.000.338,00	Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			47.940.344,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	1.561.234.110,00	Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			1.592.458.792,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														

							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				3000 Dokumen	381.250.000,00	Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	-		388.875.000,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD															
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				12 Dokumen	65.336.285,00	Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	-		66.643.010,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	84Nilai				-	767.606.640,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	-	84Nilai	776.958.772,00	
5	02	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel															

						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	484.900.780,00	Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			490.598.795,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				6 Unit	282.705.860,00	Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			286.359.977,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	84Nilai			-	162.336.837.286,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi		84Nilai	162.354.660.524,00	
5	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	9.010.450,00	Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM -DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	-		9.190.659,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				24 Laporan	161.500.827.655,00	Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM -DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	-		161.501.930.701,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	826.999.181,00	Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM -DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	-		843.539.164,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	84Nilai			-	1.566.401.800,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	-	84Nilai	1.597.729.834,00	
5	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				18 Unit	917.700.640,00	Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM -DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	-		936.054.652,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	171.091.234,00	Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM -DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	-		174.513.058,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				2 Unit	410.188.000,00	Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM -DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	-		418.391.760,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				4 Unit	67.421.926,00	Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM -DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	-		68.770.364,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
2	5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	-	-			-	625.995.272.415,00						-		628.815.225.209,00	
	5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	-	100Person			-	2.547.518.600,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	-	100Person	2.598.468.970,00		
	5	02	02	2.01	0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD															



						Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	54 Dokumen			78 Dokumen	40.980.500,00	Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM -DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	-	54 Dokumen	41.800.110,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.01	0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD														
					Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi				78 Dokumen	40.980.500,00	Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM -DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	-			41.800.110,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.01	0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD														
					Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi				78 Dokumen	18.790.810,00	Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM -DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	-			19.166.626,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.01	0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD														

						Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi				78 Dokumen	18.790.810,00	Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM -DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			19.166.626,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD														
					Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD					2 Dokumen	745.980.700,00	Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM -DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			760.900.314,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD														
					Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD					2 Dokumen	756.111.890,00	Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM -DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			771.234.127,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.01	0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran														

						Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				1 Dokumen	215.786.000,00	Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM -DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	-		220.101.720,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.01	0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota														
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten /Kota				70 Orang	710.097.390,00	Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM -DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	-		724.299.337,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	-	100Person		-	950.214.150,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	-	100Person	969.218.431,00		
5	02	02	2.02	0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah														

						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				12 Dokumen	611.345.676,00	Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM -DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			623.572.589,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.02	0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD														
						Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				936 Dokumen	130.943.090,00	Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM -DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			133.561.951,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.02	0005	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya														
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				12 Dokumen	140.980.700,00	Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM -DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			143.800.314,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

5	02	02	2.02	0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank													
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank				12 Dokumen	6.100.700,00	Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM -DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	-		6.222.714,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)													
					Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam				12 Laporan	60.843.984,00	Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM -DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	-		62.060.863,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

							rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan /Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)											
5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	-	100Per sen			-	2.038.350.464,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	-	100Pers en	2.079.117.473,00
5	02	02	2.03	0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran													

							Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				3 Laporan	393.700.511,00	Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM -DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			401.574.521,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.03	0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah															
							Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				2 Laporan	910.422.800,00	Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM -DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			928.631.256,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	02	2.03	0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota															
							Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban				2 Dokumen	734.227.153,00	Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM -DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			748.911.696,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH





							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten /Kota			12 Laporan	78.259.389.085,00	Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM -DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	-		79.300.850.112,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
3	5	02	03				PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	-	-	-	2.704.944.573,00						-	2.759.043.464,00	
	5	02	03	2.01			Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	100Person	-	2.704.944.573,00			-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	-	100Person	2.759.043.464,00	
	5	02	03	2.01	0001	Penyusunan Standar Harga													
							Jumlah Standar Harga yang Disusun			1 Dokumen	612.433.000,00	Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM -DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	-		624.681.660,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	03	2.01	0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah													

						Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah				1 Laporan	239.500.911,00	Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM -DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	-		244.290.929,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	03	2.01	0007	Pengamanan Barang Milik Daerah														
						0				100 0	562.118.900,00	Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	-		573.361.278,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5	02	03	2.01	0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah														
						Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	376.511.250,00	Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM -DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	-		384.041.475,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

5	02	03	2.01	0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah														
					Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				1 Laporan	57.747.400,00	Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM -DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	-		58.902.348,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
5	02	03	2.01	0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah														
					Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	2 Laporan			1 Laporan	856.633.112,00	Kab. Deli Serdang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM -DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif 4. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	-	2 Laporan	873.765.774,00	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
									<b>J U M L A H</b>	<b>805.886.271.289,00</b>							<b>809.068.130.542,00</b>		

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025 merupakan rujukan terhadap pelaksanaan program/ kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah yang tertuang dalam RENSTRA Tahun 2025-2026. Melalui perumusan Rencana Kerja Tahunan ini diharapkan selain akan membantu meningkatkan kinerja aparatur di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah juga pada akhirnya dapat melahirkan produk pengelolaan keuangan dan aset daerah yang berkualitas.

Badan Keuangan dan Aset Daerah mengagendakan 3 (tiga) program untuk dilaksanakan pada tahun 2025, yaitu :

- (1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- (2) Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (3) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Untuk melaksanakan program tersebut, Badan Keuangan dan Aset Daerah memperoleh dukungan dari Sumber Daya Manusia Aparatur pemerintahan di Badan Keuangan dan Aset Daerah dan juga pendanaan yang berasal dari APBD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025.

Selanjutnya untuk mewujudkan program/ kegiatan serta indikator yang telah ditetapkan maka diperlukan adanya komunikasi dan koordinasi, baik secara internal maupun kepada pihak eksternal. Dibutuhkan kerjasama yang baik dengan perangkat daerah lain yang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, sehingga dapat memberikan hasil yang maksimal serta memberikan jawaban terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi secara efisien, efektif dan akuntabel.

Selanjutnya Dokumen ini akan dijadikan sebagai pedoman bagi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang dalam menjalankan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2025. Keberhasilan dalam pelaksanaan Renja Tahun 2025 tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh sumber daya

manusia aparatur pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang serta peran aktif stakeholder yang bersangkutan.

Lubuk Pakam, Mei 2024  
KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN DELI SERDANG



*[Handwritten signature]*  
BAGINDA THOMAS HARAHAP, SH  
PEMBINA TK. I  
NIP. 19730721 199503 1 003